

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amirin, M. Tatang, 2000, *Menyusun Rencana Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ardiyanto, dkk, 1998, *Pedagang Kaki Lima di Kawasan Simpang Lima Semarang*, Lembaga Penelitian Universitas Katholik Soegijapranata, Semarang.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2007, *Makassar Dalam Angka 2007*, UD. Areso, Makassar.
- Cahayani, Ati, (Penerjemah), 2003, *Strategic Human Resources Management, Guide to Action; Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik, Panduan Praktis Untuk Bertindak*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- Danim, Sudarwan, 2000, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Edward III, George C., 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quartely Press, Washington, USA.
- Fathoni, Abdurrahmat, 2006, *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Garna, Judistira K., 1999, *Metode Penelitian Sosial (Penelitian dalam Ilmu Pemerintahan, Desain dan Rencana Penelitian)*, Primaco Akademika, Bandung.
- Gibson, James L., Ivancevich, Donelly, 1985, *Organisasi (Perilaku, Struktur, Proses)*, Erlangga, Jakarta.
- Giroth, Lexie M., 2004, *Edukasi dan Profesi Pamong Praja*, STPDN Press, Jatinangor.
- Hasibuan, SP., Malayu, 1990, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Haji Masagung, Jakarta.

- Hidayat, 1982, *Strategi Ketenagakerjaan dan Sumber Daya Manusia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Hill, Charles W.L. and Gareth R., Jones, 1995, *Strategic Management An Integrated Approach*, Houghton Mifflin Company, Boston.
- Hoogewerf, 1983, *Ilmu Pemerintahan*, Erlangga, Jakarta.
- Hodge, B.J., Anthony William P., 1998, *Organization Theory*, Allyn and Bacon Inc., Massachusetts, USA.
- Islamy, M. Irfan, 2001, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Jatmiko, Rd., 2003, *Manajemen Strategik*, UMM Press, Malang.
- Kaho, Yosef Riwu, 1998, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
-, 2003, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Manning, Chris dan Noer Effendi, Tadjuddin, 1985, *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*, Gramedia, Jakarta.
- Martoyo, 1994, *Pengantar Manajemen*, Haji Masagung, Jakarta.
- Miles, B. Matthew and Hubermann, 1992, *Qualitative Data Analysis : A Sourcebook of New Methods*, Beverly Hills , Sage Publications.
- Moenir, H.A.S., 1998, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasution, AM., 2006, *Metode Research*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Nazir, Moh., 1999, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2001, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*, Rineka Cipta, Jakarta.
-, 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 2*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Noer Effendi, Tajuddin, 2000, *Pembangunan, Krisis dan Arah Reformasi*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Nugroho, Rian D., 2004, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Rangkuti, Freddy, 2000, *Analisis SWOT Membedah Kasus Bisnis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rasyid, M. Ryaas, 1997, *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Rasyid, M. Ryaas, dkk, 2002, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar & Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan*, Jakarta.
- Ratminko, Atik Septi Winarsih, 2005, *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Robbins, P. Stephen, 2003, *Perilaku Organisasi, Konsep Kontroversi, Aplikasi*, Prenhallindo (terjemahan), Jakarta.
- Rusidi, 1999, *Metodologi Penelitian Sosial*, Program Pasca Sarjana UNPAD, Bandung.
- Riduan, 2003, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Alfa Beta, Bandung.
- Siagian, SP., 2005, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Sugiyono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Edisi Ke-13, Alfa Beta, Bandung.
- Suwandi, I Made, 2005, *Kewenangan Daerah dalam Koridor Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Tulus, Agus, 1993, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gramedia Pustaka Ilmu, Jakarta.
- Udaya, Yusuf, 1994, *Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi*, Penerbit Arcan, Jakarta.
- Wahab, Solichin A., 1997, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wasistiono, Sadu, 2003, *Kapita Selektta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Fokus Media, Bandung.

Winardi, 1994, *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, CV. Mandar Maju, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Walikota Makassar Nomor 20 Tahun 2004 Tentang *Prosedur Tetap (Protap) Penertiban Pedagang Sektor Informal (PKL) dalam Wilayah Kota Makassar*.

Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Ujung Pandang Nomor 10 Tahun 1990 Tentang *Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang*.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2005 Tentang *Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar*.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja*.

Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2005 Tentang *Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian dan Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar*.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Tahun 2005 – 2010.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, Perihal *Standar Pelayanan Publik Republik Indonesia*.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

Lampiran 1**Pedoman Wawancara**

Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima
Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Makassar

A. Wawancara ditujukan kepada Walikota Makassar

1. Bagaimanakah kebijakan yang dilakukan oleh Walikota Makassar kepada Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal penertiban pedagang kaki lima di Kota Makassar ?
2. Kendala, hambatan ataupun tantangan apa yang Bapak hadapi dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan khususnya dalam rangka penertiban pedagang kaki lima di Kota Makassar ?
3. Sejauh mana pemberian kewenangan dari Bapak dalam hal pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima diberikan kepada Camat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima?
4. Apakah Pemerintah Kota Makassar telah memberikan pemecahan lanjut terkait dengan adanya penertiban pedagang kaki lima ?

B. Wawancara ditujukan kepada Kepala Bidang Pengendalian Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar

1. Bagaimana pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kota Makassar yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar ?
2. Apakah kemampuan dalam hal sumber daya manusia anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar sudah memenuhi untuk melaksanakan penertiban pedagang kaki lima di Kota Makassar ?
3. Tindakan apakah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar apabila ada pedagang kaki lima melanggar ketentuan yang telah ditetapkan ?
4. Bagaimana dengan biaya operasional dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, apakah sesuai dengan yang diharapkan ?
5. Apakah sarana dan prasarana sudah mendukung pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima di Kota Makassar ?
6. Apakah kekompakan dan keutuhan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dalam penertiban pedagang kaki lima terlaksana di lapangan ?
7. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima di Kota Makassar ?

C. Wawancara ditujukan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

1. Bagaimana prosedur penyidik dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Makassar ?
2. Bagaimana bentuk koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dengan PPNS mengenai penertiban pedagang kaki lima di Kota Makassar ?
3. Apa wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Makassar ?
4. Apakah ada pelanggaran peraturan daerah, dalam hal ini pedagang kaki lima yang kasusnya dilimpahkan ke lembaga peradilan ?
5. Apakah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melaporkan hasil penyidikannya kepada Walikota ?

D. Wawancara ditujukan kepada Anggota Kepolisian

1. Apakah selama ini pihak Kepolisian selalu dilibatkan dalam penertiban pedagang kaki lima apabila ada yang melakukan tindakan kriminal ?
2. Sejauh mana keterlibatan pihak Kepolisian dalam penertiban pedagang kaki lima ?